

**GEREJA DAN TAHUN POLITIK 2024:
MENINJAU RUANG PRODUKSI EKONOMI
BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI MANGGARAI RAYA**

Oleh:

Fr. Atro Sumantro, SVD

Mahasiswa Semester IV Prodi Filsafat IFTK Ledalero

Abstrak: Tulisan ini memproposalkan kajian produksi ruang pembangunan perekonomian di Manggarai melalui tiga langkah praktis konkret. Ketiga langkah ini diprakarsai oleh pemerintah dan Gereja lokal. Tiga poin itu mencakup pemberdayaan ruang produksi pertanian, industri dan jasa yang semenjak lama sudah tertanam dalam diri masyarakat Manggarai. Ketiga hal itu bercokol dari konsep hasil sidang pastoral post Natal Keuskupan Ruteng yang bertemakan “Tahun Ekonomi Berkelanjutan: Sejahtera, Adil, dan Ekologis”. Membaca konteks realitas politik keberpihakan di Manggarai, keberpihakan terhadap pembangunan ruang produksi ekonomi telah memberi sekaligus membuka mata masyarakat akan adanya tindakan diskriminasi elite politik terhadap masyarakat kecil, miskin dan tidak berdaya. Tahun politik tidak hanya menjadi ajang pertarungan merebut kekuasaan, tetapi juga membangun sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Tulisan ini dikaji melalui studi literatur kepustakaan. Dua kontribusi utama Gereja dan Pemerintah yang relevan bagi pembangunan perekonomian di Manggarai adalah menetapkan sistem pertanian modern, industri dan jasa lokal sebagai faktor produksi utama dan kebijakan Pemerintah yang menstabilkan politik pasar dengan menetapkan ketiga sistem perekonomian menjadi suatu agenda baru yang menstimulus elite politik sebagai peluang positif dalam kontestasi pemilihan umum 2024.

Kata Kunci: Gereja, Tahun politik, Produksi, Sistem ekonomi, Pertanian.

Pendahuluan

Tahun politik 2024 adalah tahun penuh pergolakan dan pertimbangan manusia dalam memilih dan menentukan pilihan yang memberi kepastian jaminan hidup bersama. Pilihan itu akan menentukan pemimpin negara yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi-Ma'aruf, pemimpin daerah (Gubernur, Wali Kota, Bupati dan jajarannya) yang berusaha membangun dan meneruskan estafet pemerintahan daerah, serta perwakilan rakyat yang merumuskan aspirasi rakyat dengan mengesahkan undang-undang¹. Hemat saya, tahun politik 2024 tidak hanya menentukan lingkungan politik yang ideal bagi perkembangan kehidupan manusia, tetapi juga serentak momen pembuktian kepercayaan yang diberikan publik kepada wakil rakyat dalam berbagai bidang kehidupan.

Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo menjelaskan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.² Atas dasar pengertian itu, kegiatan politik di Indonesia merupakan momen pertarungan ide dan gagasan elite politik yang merepresentasikan kepentingan masyarakat yang berbasis daerah domisili, meskipun cenderung memainkan kekuasaan atas kepentingan atau ego pribadi masing-masing calon.³

Wilayah Manggarai (Timur, Tengah, Barat) sebagai wilayah terdampak pemilihan umum serentak 2024 juga merasakan nuansa politis dalam menentukan masa depannya. Akhir-akhir ini, berbagai isu-isu penting diangkat untuk menunjukkan keprihatian dan ajang merebut hati masyarakat Manggarai. Elite politik menelurkan ide-ide dan gagasan-gagasan aktual yang menyentuh realitas keprihatian masyarakat Manggarai. Gagasan-gagasan itu nampak dalam isu kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) demi pembangunan masyarakat Manggarai Barat, pembangunan geothermal di Poco Leok, Manggarai, pengembangan usaha Kopi Colol dalam skala nasional dan internasional di Manggarai Timur. Namun, bukankah ide-ide dan gagasan-gagasan pembangunan semacam itu sudah terbiasa didengar dan dikumandangkan dalam setiap kampanye tanpa ada bukti realisasi yang sungguh dirasakan oleh masyarakat Manggarai? Ataukah ide-ide dan gagasan-gagasan itu terlampau berat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkepanjangan? Sekiranya masyarakat Manggarai memiliki penilaian dan pengetahuan yang mendalam, serta merasakan realitas pembangunan yang sungguh real, maka pembangunan wilayah Manggarai memiliki jaminan dalam masa depannya.

Wacana pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu topik sentral baik bagi elite politik maupun Gereja dalam membangun kehidupan bersama. Gereja Keuskupan Ruteng dalam sidang pastoral post Natal 5-7 Januari 2023 bertemakan “Tahun Ekonomi Berkelanjutan: Sejahtera, Adil, dan Ekologis”⁴ mengamini adanya perjuangan

membebaskan umat Manggarai dari ketidakadilan perekonomian dengan menciptakan program-program ekonomi kreatif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengenal dan mempromosikan wilayah pariwisata sebagai penunjang perekonomian yang berpeluang di masa mendatang, tetapi lebih dari itu menciptakan keseimbangan dan keberlangsungan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah.

Meskipun demikian, yang menjadi pertanyaan dan kecemasan serta tantangan yang perlu dilihat dan diwaspadai oleh Gereja adalah bagaimana merealisasikan program itu tanpa ada unsur politis yang membawahi kepentingan golongan tertentu, juga serentak memberi jaminan konkret terhadap pemberdayaan dan keseimbangan partisipasi masyarakat dalam ruang ekonomi yang produktif, akuntabel dan transparan?.

Wacana Ekonomi dan Politik 2024 di Manggarai

Pada hakikatnya, sistem politik Indonesia merupakan kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.⁵ Kehadiran penetapan tahun 2024 sebagai tahun politik menempatkan negara dalam usaha mengembangkan diri melalui tokoh-tokoh politik yang tampil mewakili suara-suara rakyatnya. Tokoh-tokoh politik itu adalah mereka yang mewakili kepentingan daerah domisilinya masing-masing, bukan kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan golongan tertentu, seperti rekan artis, investor asing atau pun arahan ketentuan ketua partai politik.⁶ Pertarungan kepentingan dalam pemilihan umum selalu berlandaskan kepentingan rakyat wilayah domisilinya untuk anggota legislatif dan kepentingan semua orang untuk anggota eksekutif. Keduanya itu dibungkus dalam satu tujuan, yakni kebaikan hidup bersama (*bonum commune*).

Meskipun demikian, tahun 2024 sebagai tahun politik di Manggarai menempatkan masyarakat dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki sikap antusiasme dalam memilih, tetapi pada sisi lain masih terdapat sikap traumatis terhadap “janji-janji manis” anggota politisi dalam setiap pemilihan umum yang masih nihil. Terdapat dua alasan utama yang penulis temukan di sini. Pertama, konflik politik yang masih jalan di tempat. Pemilihan umum seringkali menjadi momen memecah belah persatuan dan berujung pada

degradasi kualitas konflik politik di mata masyarakat. Kualitas konflik politik yang rendah itu dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik yang dapat membahayakan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan hidup sosial dan politik itu menjurus kepada kondisi pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan kaum masyarakat yang tertindas dan menengah ke bawah. Elite politik memainkan suatu kekuasaan yang justru bertentangan dengan sistem demokrasi yang diimani oleh masyarakat. Selain itu, kekuasaan elite politik juga mengeruk nilai-nilai atau kekayaan budaya yang menggerakkan suatu kehidupan masyarakat lokal.

Salah satu temuan pemilu 2014 yang hampir di semua daerah adalah adanya partai politik (parpol) yang cenderung mencampuradukkan kegiatannya sebagai legislator dengan sebagai kader partai. Program pemerintah diklaim merupakan program partai.⁷ Hemat saya, temuan itu masih aktual sampai saat ini dan kemungkinan besar diproduksi kembali dalam masa pencalonan anggota legislatif dan eksekutif pada pemilu 2024 mendatang. Keadaan politik yang tidak proporsional amat memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan bidang kehidupan lainnya, terkhusus kebijakan ekonomi sebagai akses penunjang kebutuhan hidup manusia.

Ketersisihan masyarakat karena faktor kepentingan elite politik dalam memproduksi ruang kerja sendiri menciptakan suatu distansi antara kebutuhan sehari-hari, ruang produksi dan daya konsumsi yang semakin hari semakin naik. Kebijakan pemerintah melalui elite politiknya yang duduk di kursi parlemen tendesi menempatkan ego yang mendahului kepentingan pribadi daripada kebutuhan hidup masyarakat universal.

Kedua, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Tahun politik 2024 juga bisa menjadi tahun di mana kesenjangan ekonomi dan sosial semakin melebar. Kandidat atau elite politik menawarkan solusi-solusi yang tidak realistis dan tidak masuk akal terhadap problem ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan keberadaan perekonomian masyarakat.

Dalam data yang disajikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu -0,27 persen.⁸ Selain karena faktor dampak dari pandemi Covid-19, penurunan produksi di beberapa kategori usaha menyebabkan kualitas laju pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Misalnya, usaha-usaha kaum menengah di Labuan Bajo yang tergeser akibat investasi besar-besaran oleh investor asing, kuliner-kuliner lokal yang tergantikan oleh makanan cepat saji luar negeri di berbagai kafe dan restoran. Hal ini ditengarai oleh akses keterbukaan pemerintah menerima investor asing tanpa filtrasi pembangunan yang efektif. Alhasil, aktus itu menggugurkan peluang dan daya kompetitif perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang sedang berkembang.

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai yang disadur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Manggarai 2020 menjelaskan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari nilai distribusi PDRB atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan sumbangannya sebesar 21,54%, dan berturut-turut diikuti oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan Gereja dan Tahun Politik VOX LEDALERO . 111 jaminan sosial wajib 15,69%, kategori konstruksi sebesar 13,99%, serta kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,28%.⁹

Perbandingan data ini justru berbanding terbalik dengan praktik pembangunan yang berfokus dan berorientasi pada pariwisata, media dan politik yang nota bene masih berada di bawah pembangunan ekonomi sistem pertanian. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan kompleksitas perhatian elite pemerintahan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah masih rendah. Idealisme politik pembangunan jauh berkuasa atas kepentingan pribadi daripada politik keberpihakan pada masyarakat miskin dan tertindas. **Keberpihakan Gereja: Hasil Sidang Pastoral Post Natal 2023**

Keuskupan Ruteng Keputusan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng mengangkat tema ekonomi berkelanjutan dalam sidang pastoral post Natal di Manggarai merupakan

suatu pembacaan realitas yang menyentuh masyarakat miskin dan tertindas di Manggarai. Pembacaan itu juga merupakan hasil survey kekayaan alam yang masih luas dan mumpuni. Sebagai contoh, daerah pariwisata yang terdapat di berbagai daerah, baik dari daerah perkotaan maupun daerah-daerah terpencil belum memiliki akses transportasi dan komunikasi yang lancar.

Selain itu, kualitas faktor produksi yang semakin menurun melemahkan daya kreativitas pelaku usaha mikro dan daya konsumsi masyarakat yang beralih kepada produk-produk luar. Selain itu, kondisi pembangunan yang terdegradasi oleh faktor eksternal adalah adanya kuasa pembangunan elite politik yang menciptakan penyimpangan dalam sistem ekonomi, serta berakibat pada penciptaan kemiskinan struktural yang radikal. Sebab itu, kajian pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diambil Gereja melalui seruan semangat episcopal uskup Ruteng, "Omnia in Caritate" dan dokumen *Gaudium et Spes* adalah tinjauan konsep holistik pembangunan yang semestinya direalisasikan.

Secara harafiah, term "Omnia in Caritate" berasal dari bahasa Latin yang berarti "Semuanya dalam Kasih". Motto ini merujuk pada ajaran Yesus Kristus dalam kitab suci, bahwa kasih merupakan dasar dari semua perbuatan, dan seharusnya menjadi prinsip utama bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran-Nya.

Dalam konteks keuskupan Ruteng, semangat *Omnia in Caritate* dilatari oleh dan bertujuan terhadap pembangunan yang berjalan di tengah pandemi covid-19 waktu itu. Dua tujuan dasar adalah membantu penanganan dan pencegahan covid-19 melalui promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat kelompok rentan/ berisiko.¹⁰ Di satu sisi, kelompok rentan ini berhubungan dengan mereka yang memiliki penyakit bawaan, tetapi di sisi lain kelompok rentan ini dikhususkan juga bagi mereka yang miskin dan telantar dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bagi Gereja, hal ini diartikan sebagai panggilan untuk melakukan tugas pastoral dan pelayanan dengan penuh kasih, memberikan perhatian yang tulus pada semua umat dan membangun persatuan di dalam Gereja. Semangat "Omnia in Caritate" juga mencerminkan kebijaksanaan dan kerendahan

hati dalam kepemimpinan, sehingga membawa keselarasan dan kedamaian dalam seluruh tindakan keuskupan.

Dokumen *Gaudium et Spes* adalah salah satu dari empat dokumen utama yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II, yang diadakan antara tahun 1962 dan 1965.¹¹ Dokumen ini berisi tentang ajaran Gereja Katolik mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. *Gaudium et Spes* menetapkan sistem ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan manusia yang lebih tinggi, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum, dan bukan hanya sekadar untuk mencapai keuntungan materi. Kajian sistem ekonomi mesti dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan hanya untuk menghasilkan uang.

Ekonomi zaman sekarang, seperti juga bidang-bidang kehidupan sosial lainnya, ditandai oleh berkembangnya kedaulatan manusia atas alam tercipta; oleh berlipatganda dan makin intensifnya hubungan-hubungan serta ketergantungan timbal-balik, antara warga masyarakat, kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa, pun diwarnai juga oleh makin kerapnya campur tangan kekuasaan politik. Sementara itu kemajuan-kemajuan dalam cara memproduksi dan pertukaran harta-benda maupun jasa-jasa, telah menjadikan ekonomi suatu upaya yang cocok, untuk dapat lebih efektif memenuhi kebutuhankebutuhan keluarga manusia yang semakin bertambah (GS: 63).¹²

Gaudium et Spes juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi. Dokumen ini menuntut agar sistem ekonomi tidak hanya menguntungkan golongan tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Hal ini berarti bahwa tindakan ekonomi harus memperhitungkan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk dampak sosial, lingkungan, dan budaya serta memproses setiap ketimpangan yang ada dalam sistem sosial-ekonomi.

Ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi terdapat juga antara pertanian, industri dan jasa, begitu juga antara berbagai daerah dalam satu negeri. Pertentangan antara bangsa-bangsa yang lebih maju perekonomiannya

dan bangsa-bangsa lainnya semakin meruncing, sehingga dapat membahayakan perdamaian dunia sendiri (GS:63).¹³

Ruang Produksi Ekonomi Kreatif Masyarakat Manggarai: Tanggapan Konkret Tahun Politik 2024 di Manggarai

Menimbang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam ruang ekonomi di Manggarai, Gereja dan pemerintah daerah mesti merealisasikan secara konkret konsep pembangunan ekonomi yang adil, seimbang dan merata. Sebab, kecenderungan Gereja untuk terlibat aktif dalam dunia politik mesti diwaspadai dengan adanya boncengan kepentingan elite politik yang menggusur perekonomian masyarakat dalam konteks pilkada dan anggota legislatif 2024. Elite politik yang tidak bertanggung jawab akan memainkan investor asing guna menekan sistem ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang masih berada dalam taraf pengembangan. Oleh karena itu, kedudukan Gereja yang masih memegang tradisi dan pengembangan kebudayaan mesti menarik dan sekaligus menyadarkan pemerintah akan fungsi pembangunannya dalam keberlangsungan perekonomian masyarakat.

Terdapat tiga langkah solusi praktis yang penulis tawarkan dalam mereliasasikan konsep ekonomi berkelanjutan di Manggarai. Pertama, pemberdayaan sistem ekonomi pertanian dengan melibatkan masyarakat sebagai faktor produksi utama. Melihat data yang tersaji, produktivitas kerja masyarakat Manggarai terdapat pada usia 15-60 tahun, atau usia produktif dengan persentase 64,13%.¹⁴ Lebih lanjut kontribusi terbesar dalam lapangan usaha di Manggarai berangkat dari usaha pertanian yang mencapai 21,54%.¹⁵

Melihat hal itu, langkah konkret yang mesti dilakukan Gereja dan Pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan investor asing, sambil menata kembali fasilitas pertanian modern yang menggunakan teknologi, pengembangan SDM melalui sosialisasi dan kursus. Selain itu, penempatan ahli serta mahasiswa pertanian yang berprestasi di lokasi-lokasi strategis seperti di Lembor, Cancar, dll yang notabene wilayah lumbung padi yang besar, di Colol untuk wilayah pertanian khususnya kopi, serta wilayah-wilayah lain yang berpotensi meningkatkan kemajuan dalam sistem pertanian.

Kedua, peningkatan sistem industri yang memacu persaingan dengan produk-produk dari luar. Untuk konteks ini, Labuan Bajo sebagai pusat industri baru mesti memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam mengakomodasi kreativitas dan inovasi pada tempat yang seimbang dengan investor asing.

Dalam hal ini, pemerintah melalui kebijakkannya mesti mempertimbangkan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan ekologis. Langkah itu mendorong pemberdayaan teknik industri lokal masyarakat Manggarai yang memanfaatkan lingkungannya tanpa adanya daya eksploitasi yang semena-mena. Sebab, hemat saya masyarakat Manggarai dalam tradisi Gerejanya memegang suatu prinsip yang menghargai alam sebagai saudara yang melindunginya.

Ketiga, pemberdayaan jasa orang Manggarai di berbagai bidang industri dan pertanian. Pemerintah dan Gereja mesti bertindak sebagai aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat Manggarai. Pemerintah secara khusus mesti memberikan kesempatan kerja melalui “pasar” yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang di Manggarai, baik sebagai produsen, pedagang, maupun tenaga kerja lainnya seperti sopir angkutan atau karyawan toko.

Penggunaan jasa yang menyeluruh ini memastikan bahwa masyarakat Manggarai tidak kehilangan arah dan berakhir dengan merantau ke luar kota serta membangkitkan semangat dan pembangunan perekonomian masyarakat yang miskin dan telantar dalam sistem ekonomi kehidupannya baik secara personal maupun komunal. Oleh karena itu, tugas Pemerintah untuk menstabilkan politik pasar menjadi suatu agenda baru yang menstimulus elite politik memanfaatkan peluang positif itu dalam kontestasi pemilihan umum 2024.

Penutup

Kehadiran program ekonomi berkelanjutan dalam Gereja Keuskupan Ruteng bukanlah suatu problem “mewah” apabila hanya menjadi konsep yang bersifat politis. Keberpihakkan pemerintah dan Gereja dalam politik pembangunan di Manggarai membutuhkan suatu realisasi yang menjerumuskan masyarakat pada pengembangan kreativitas dan inovasi, serta serentak menjerat elite politik dalam suatu pertobatan universal.

Dorongan pemerintah dan Gereja bagi pembangunan perekonomian masyarakat Manggarai merupakan suatu sumbangsih yang memberi ruang positif bagi pergerakan masyarakat ke depannya, khususnya menjadi pemilih yang berkualitas dalam tahun politik 2024. Oleh karena itu, dorongan dalam tiga hal yang saya sebut di atas; sistem pertanian, industri dan jasa menjadi rujukan bagi Pemerintah dan Gereja untuk melihat, menimbang dan memutuskan (3M) ruang produksi ekonomi di Manggarai dalam waktu mendatang. Selain itu, ruang produksi itu juga menjadi daya baru bagi masyarakat Manggarai yang lebih kreatif dan disiplin dalam ilmu kerja, khususnya produktivitas pembangunan ekonomi.

Catatan Akhir

¹Iqbal Basyari, “Pilkada 2020, Investasi Menuju Kontestasi 2024” Kompas. id 11 Desember 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/11/pilkada-2020-investasi-menuju-kontestasi-2024>, diakses pada 10 April 2023.

² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16.

³ Ratih D. Adiputri, “Memahami Keterwakilan Politik”, Kompas. Id 12 April 2023 <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/11/memahami-keterwakilan-politik>, diakses pada 12 April 2023.

⁴ Komsos Ruteng, “Hasil Sidang Pastoral Post Natal Keuskupan Ruteng, 9 – 13 Januari 2023” dalam <https://keuskupanruteng.org/hasil-sidang-pastoralpost-natal-keuskupan-ruteng-9-13-januario-2023/>, diakses pada 10 April 2023.

⁵ Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

⁶ Komsos Ruteng, loc.cit. Gereja dan Tahun Politik VOX LEDALERO . 117

⁷ Tim Peneliti INFID dan LIPI, Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Pustaka Sempu, 2014), hlm. 16.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, Indikator Ekonomi Kabupaten Manggarai 2021 (Ruteng: Percetakan Kembang Indah, 2021), hlm. 15-16.

⁹ Ibid., hlm. 17-19.

¹⁰ Marianus Mantovanny Tapung, Max Regus, Marsel R. Payong, Marianus S. Jelahun, “Pelayanan Sosial Karitatif Posko “Omnia In Caritate” Keuskupan Ruteng kepada Kelompok Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Manggarai Raya”, *Empati, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9:1,(Juni, 2020), hlm. 73-74.

¹¹ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, dalam *Katolisitas.org*, <https://www.katolisitas.org/konstitusi-gaudium-et-spes/>, diakses pada 10 April 2023.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, *op.cit.*, hlm. 8. 15 *Ibid.*, hlm. 13